



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ROBBY KURNIAWAN**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG LOGISTIK DAN MULTIMODA PERHUBUNGAN**
3. NHK : **707433**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **8.645.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/250.13 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 690 m2/190 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
4. Tanah Seluas 19999 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 19999 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 19999 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 19999 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
10. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
11. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
12. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL



SENDIRI Rp. 45.000.000

13. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL

SENDIRI Rp. 45.000.000

14. Tanah Seluas 12000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL

SENDIRI Rp. 45.000.000

15. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL

SENDIRI Rp. 100.000.000

16. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL

SENDIRI Rp. 100.000.000

17. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL

SENDIRI Rp. 100.000.000

18. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL

SENDIRI Rp. 70.000.000

19. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL

SENDIRI Rp. 100.000.000

20. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MUSI BANYUASIN, HASIL

SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 750.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI VERSYS / 650 CC Tahun 2013, HASIL

SENDIRI Rp. 50.000.000

2. MOBIL, VELLFIRE AT MINI BUS Tahun 2013, HIBAH TANPA

AKTA Rp. 400.000.000

3. MOBIL, MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 1.5 L ULTIMA MINIBUS

Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 275.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 275.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 9.945.000.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.945.000.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

- Nama : AVIRIANTO SURATNO
- Jabatan : KEPALA PUSAT
- NHK : 180677

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.370.000.000

- Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.800.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/300 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

- MOTOR, NORTON 500 CC SEPEDA MOTOR Tahun 1954, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOBIL, MERCEDEZ BENZ E240 Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 305.722.501

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 239.320.383

F. HARTA LAINNYA Rp. 340.188.095

Sub Total Rp. 4.351.230.979

III. HUTANG Rp. 104.347.496

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.246.883.483

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JUMARDI**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **110275**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **3.330.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **6.500.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **8.600.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **479.984.540**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **3.825.084.540**

III. HUTANG

Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. **3.825.084.540**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARWANTO HERU SANTOSO**
2. Jabatan : **KEPALA DISTRIK NAVIGASI**
3. NHK : **254762**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.507.723.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 3807 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 272.200.500
5. Tanah Seluas 2051 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 146.646.500
6. Tanah Seluas 3271 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 233.876.500
7. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.200.000
8. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.200.000
9. Tanah Seluas 3807 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 272.200.000
10. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.250.000
11. Tanah Seluas 3500 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.250.000
12. Tanah Seluas 3300 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL



SENDIRI Rp. 235.950.000

13. Tanah Seluas 3300 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL

SENDIRI Rp. 235.950.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

345.800.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL

SENDIRI Rp. 8.100.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI

Rp. 5.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI

Rp. 2.700.000

4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G / MINIBUS Tahun 2015,

HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

5. MOBIL, SUZUKI IGNIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

201.284.000**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

13.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp.

1.006.327.772**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

---**Sub Total**

Rp.

5.074.135.272**III. HUTANG**

Rp.

---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

5.074.135.272**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SURANTO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **232173**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.237.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m²/70 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 455.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/21 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 237.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/29 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
4. Bangunan Seluas 27.08 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 109.500.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, SUNDIRO SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO125 CBS ISS SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000
6. MOTOR, YAMAHA 509 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 100.250.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	275.959.723
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.722.709.723
III. HUTANG	Rp.	310.000.001
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.412.709.722

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVYANTO WIDADI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 468164

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.400.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m2/200 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 2.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 13020 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 976.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 3534 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 265.050.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2790 m2/1 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 209.250.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 491.093.185

1. MOBIL, CHEVROLET TRX 14 TURBO LTZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. MOBIL, JEEP LAND ROVER 2630 Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 136.093.185
3. MOBIL, BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX 150 IE AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 190.923.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 410.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.492.816.185
III. HUTANG	Rp.	720.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.772.816.185

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.